

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
Gelara Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

RETNO KUSUMASTUTI

NIM: E 000 5270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)**



**Disusun oleh
RETNO KUSUMASTUTI
NIM: E.0005270**

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Rehnalemken Ginting, S.H, M.H.

NIP. 19580105 198403 1 001

Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum

NIP. 19570203 198503 2 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulis Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)**

Disusun oleh:
RETNO KUSUMASTUTI
NIM: E.0005270

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Maret Sebelas Sukarta
pada:

Hari :
Tanggal :

TIM PENGUJI

1. :
Ketua
2. :
Sekretaris
3. :
Anggota

MENGETAHUI
Dekan

Moh.Jamin, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 154

KATA PENGANTAR

Puja puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”**

Penulisan hukum ini membahas pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam ranah hukum Pidana, serta dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam menjatuhkan Putusan Nomor 28/ Pid.B/ 2009/ PN-Srg terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam proses yang panjang ini, penulis telah mendapat sokongan bantuan yang tak dapat dikata sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan hukum ini baik secara materiil maupun secara non materiil. Untuk itu penulis pada kesempatan ini hendak menyampaikan lautan terima kasihnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S. H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan kesempatan serta ijinnya kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH UNS yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak R. Ginting, S.H, M.H, selaku Pembimbing I skripsi Penulis. Atas semua bimbingan, arahan, suport yang teramat besar. Dan banyak pengetahuan baru yang penulis dapat secara tidak langsung dalam setiap bimbingan yang diberikan.

4. Ibu Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing II skripsi penulis. Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini dan selama penulis kembali mempelajari mata kuliah hukum pidana.
5. Bapak Poltak Sitorus, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Sragen, Bapak Kristiawan, S.H, selaku Ketua Panitera Muda Pengadilan Negeri Sragen serta Ibu Soegiarti, S.H., M.H, selaku Hakim Anggota dalam perkara No. 28/Pid.B/2009.PN-SRG yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak masukan dalam penulisan hukum ini.
6. Seluruh staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Sragen atas informasi data yang diperlukan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, membimbing Penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi Penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
8. Bapak Suharto.WR , Ibu dr.Sri Sabarsih Pudjiastuti, orang tua Penulis atas semua dukungan dan kasih sayang yang telah penulis rasakan selama 22 tahun.
9. Nimas, adik Penulis dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas seluruh doa. dukungan, perhatian serta kasih sayang.
10. Almamater kedua di FH yang telah memberikan pelajaran hidup yang tiada terkira. Laboratorium Seni Teater Delik, semoga nafasmu senantiasa tersambung demi paseduluran kita semua.
11. Panitia 9, Babi, Menul, Mpis, Menk, Gondang, Irma, Paiye, Tembonk, atas semua *support* dan dukungan serta cinta yang tiada habis hingga akhir masa studi kita disini. Semoga kita dapat selalu meluangkan waktu untuk bersama, melepas lelah dalam rutinitas yang padat. "*Aku sayang kalian semua.*"
12. Dian Savitri, atas dampingan dan persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menemaniku 7 tahun terakhir ini.
13. Seluruh sedulur yang ada di Delik, mulai dari para sesepuh hingga adik-adikku yang telah merasakan kembang kempis dunia Delik, semoga

paseduluran kita abadi selamanya, tak sebatas partner kerja di masa kepengurusan.

14. Teman-teman magang di Permata Bank, yang menjelma menjadi teman bermain setelahnya.
15. Tim Indisipliner Somasi 2008, terima kasih atas pengertian pada semua emosiku selama menjadi partner kerja kalian semua. Viva Justicia!!
16. Teman-temanku di Fakultas Hukum UNS, Reza, Siwenk, Brama, Anggun, Andre, Ruri, Elisa, Fenti, Rudi, Dedik, Ela, Ayu, Pekik, Henry, Nila, Ratna, Ijup, Tony, Thukul, Dony, Payto, Kotrex, Hendrik, Herdian dan semua angkatan 2005 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidupku dan selalu menjadi kenangan.
17. Teman-temanku di Pondok Asri, yang tentunya tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini
18. Special thanks untuk pihak yang direpotkan secara langsung dalam pembuatan skripsi ini, Dian Savitri, Novis Purwaningrum, Ermellia Octaviani, Dhina Kharisma Hari Wibowo, Umar Januardi, Febty Wijayanti, S.H., Ayu Theresia Happy, Aswin Yuki, S.H., Dendhra, S.H., Nanang Fao Rino dan Widyarti Nata Elya.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materiil.
20. Terakhir namun yang terpenting, kepada sebuah pengharapan yang entah nyata atau fana, selalu membuatku bertahan hidup.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum Ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Surakarta, Juli2009

Penulis

RETNO KUSUMASTUTI

ABSTRAK

Retno Kusumastuti, 2009. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen). Fakultas Hukum UNS.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sragen. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi atau pengamatan dan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan mempergunakan analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa (I) Andi Triyono bin Sukiman dan terdakwa (II) Ongen Latul bin Nikolas Latul adalah Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Dimana unsur-unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi. Dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah sesuai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen. Untuk selanjutnya penulis berharap agar dikemudian hari apabila terjadi kembali kasus serupa, hakim yang memutus perkara dapat lebih jeli dan teliti dalam menimbang semua unsur yang terdapat dalam kasus tersebut, sehingga dalam membuat putusan dapat lebih tepat. Penulis juga berharap bahwa adanya putusan mengenai perkara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen ini dapat memberi efek jera bagi seluruh masyarakat yang mengetahuinya, sehingga perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama tidak terjadi lagi di masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PENULISAN HUKUM.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kerangka Teori.....	
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	20
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	34
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan.....	41
B. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pengaturan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	58
B. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam Putusan No. 28/Pid.B/2009/PN-Srg Tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.....	65

BAB IV	PENUTUP.....	81
	A. SIMPULAN.....	81
	B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional seyogyanya memang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersamaan. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang bagi peran serta masyarakat tersebut. Kerja sama tersebut, diharapkan akan membantu terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu sektor yang amat mendasar dan perlu selalu diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah adalah sektor ekonomi, yang notabene merupakan tiang penyokong bagi terbentuknya suatu negara yang adil, makmur, dan sentosa. Karena tak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian suatu negara sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan bangsa dan masyarakat suatu negara. Di Indonesia sendiri, pada akhir era sembilan puluhan terjadi krisis ekonomi dan moneter yang salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya sistem ekonomi di negara kita. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk pembaharuan dalam tata perekonomian Indonesia. Hal ini tampaknya disikapi pemerintah dengan pemberian kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan menghapus adanya monopoli di bidang ekonomi. Salah satu bentuk konkret dari hal tersebut adalah dengan pemberian kredit yang diberikan melalui media keuangan dan pembiayaan.

Istilah lembaga pembiayaan digunakan sebagai padanan istilah Bahasa Inggris *financing institution*. Dalam kegiatan usahanya lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, dimana ia adalah badan usaha

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan sebenarnya lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan itu sendiri.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan meliputi bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan berikut ini :

1. Sewa guna usaha (*leasing*)
2. Modal ventura (*venture Capital*)
3. Perdagangan surat berharga (*Securities Trade*)
4. Anjak piutang (*factoring*)
5. Usaha kartu kredit (*Credit card*)
6. Pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) (Abdul Kadir Muhamad, Rida Mulniarti, : 18)

Dari sekian jenis usaha pembiayaan yang ada yang amat dekat dengan masyarakat Indonesia adalah lembaga pembiayaan jenis sewa guna usaha atau *leasing*. Karena tipikal masyarakat Indonesia yang ingin memiliki barang bagus walaupun sebenarnya belum mempunyai uang yang cukup membuat masyarakat mengambil jalan pintas dengan menggunakan sistem *leasing*. Arti dari kata *leasing* sendiri adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai yang telah disepakati bersama (Edy P Soekadi, 1990:16).

Dewasa ini *leasing* yang paling populer di kalangan masyarakat adalah *leasing* kendaraan bermotor, baik jenis kendaraan roda empat maupun roda dua. Menjamurnya perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang ini seolah juga memicu minat masyarakat untuk mendapatkan barang dengan murah dengan cara yang instan.

Berawal dari pengertian tersebut kemudian terjadi kesalah pahaman yang mendasar, dimana lembaga pembiayaan khususnya *leasing* yang amat dekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dinilai harus mau dan mampu membanjiri masyarakat umum dengan fasilitas kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai beranjak, merambah pada pemberian kredit untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang mulai bergaya hidup konsumtif. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu membeli suatu barang yang harganya jauh diatas kemampuan ekonomi mereka menjadi tergiur dengan iming-iming harga murah dan fasilitas kredit yang mudah. Hal ini kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari ketika jatuh tempo pembayaran tiba.

Di sisi lain, sistem *leasing* sebenarnya menyimpan resiko yang besar. Bagi pihak kreditur, resiko hilangnya barang yang telah disalurkan tanpa adanya pelunasan cicilan pembayaran tentu merupakan resiko utama kredit, yang sangat ditakutkan oleh pihak *lessor* atau perusahaan *leasing*, karena seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi memungkinkan berbagai tindak kejahatan berkembang pesat, contohnya seperti pemalsuan data debitur ketika mengajukan permohonan kredit, data palsu tersebut tentunya memudahkan pencairan kredit yang nantinya akan hilang, tanpa pengembalian dari debitur tersebut.

Sedangkan bagi pihak debitur dalam hal ini masyarakat, sebenarnya kredit dengan sistem *leasing* juga mempunyai dampak negatif, yaitu memicu sikap konsumtif dalam benak masyarakat. Sehingga walaupun kredit juga dapat menguntungkan bila digunakan sebagai suatu bentuk permodalan bagi suatu usaha, namun kredit juga dapat meracuni pikiran masyarakat dengan anggapan bahwa mereka dapat memiliki apa pun yang mereka inginkan, walaupun mereka belum mempunyai dana yang cukup, yaitu dengan jalan

meminjam atau kredit. Sedangkan *leasing* membuat masyarakat menjadi konsumtif karena dengan anggaran dana yang tidak begitu besar mereka dapat memiliki kendaraan bermotor yang bagus misalnya. Mereka kadang tidak menyadari bahwa suku bunga yang tinggi dari kredit tersebut dapat menyusahkan mereka di kemudian hari saat hari pembayaran hutang tiba.

Selain itu ada suatu hal yang sebenarnya tanpa disadari sangat merugikan masyarakat yaitu masalah perjanjian yang dibuat antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Pada umumnya pada saat awal pembuatan kesepakatan kredit kendaraan bermotor oleh suatu lembaga *leasing*. Debitur disodori suatu perjanjian yang bentuknya adalah perjanjian baku atau kontrak standart yang dibuat secara sepihak oleh pihak *lessor*. Dari sini sebenarnya sudah ada yang kurang pas bila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, karena debitur tidak mempunyai keleluasaan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan disepakati. Dan sebagai pihak pembuat perjanjian tentunya pihak *lessor* akan membuat klausula-klausula yang menguntungkan bagi mereka. Berikut akan penulis sajikan beberapa petikan yang dinilai merugikan debitur dari isi perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan *leasing*:

1. Debitur harus membayar denda sebesar 0,5% perhari untuk sepeda motor dan 0,2% perhari untuk mobil dari keseluruhan nilai cicilan perbulan apabila melakukan keterlambatan pembayaran;
2. Apabila kewajiban debitur kepada kreditur tidak dapat dipenuhi karena debitur pailit, meninggal dunia, dibawah pengampuan, lalai membayar, memindah tangankan barang kepada pihak lain, dan membuat pernyataan tidak benar dalam data yang digunakan dalam perjanjian, maka pihak kreditur dapat menagih piutangnya atau menarik barang *leasing* secara seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
3. Kreditur berhak memasuki tempat dimana barang berada, memeriksa jaminan, menyuruh lakukan, atau membuat tanda pada barang yang dijadikan objek *leasing* yang berada di tangan *lessee*;

4. Pajak menjadi beban pihak debitur, dan barang objek *leasing* wajib diasuransikan;
5. Apabila debitur tidak melunasi hutang kreditnya, maka kreditur berhak dengan ini diberi kuasa substitusi oleh debitur untuk mengambil dimanapun, di tempat siapa pun barang berada, dan menjualnya secara umum.

Dari banyaknya klausula yang sebenarnya merugikan ini seharusnya calon debitur sudah memahami resiko yang mungkin timbul dari adanya suatu perjanjian *leasing*. Dalam dunia usaha dewasa ini sering kali muncul istilah *Take it or leave it*. Yaitu suatu ungkapan yang menghimbau kepada pihak pembuat perjanjian untuk tidak mengesahkan perjanjian apabila memang dirasa ada hal yang akan merugikannya dari perjanjian tersebut. Namun sekali lagi, gaya hidup konsumtif dan kurangnya pemahaman mengenai hukum bagi masyarakat Indonesia membuat mereka tidak berpikir panjang ketika akan membuat suatu perjanjian yang sebenarnya di kemudian hari akan menyusahkan mereka sendiri. Pada akhirnya yang terjadi hanyalah adanya kredit bermasalah yang pasti akan menimbulkan berbagai masalah baru yang sulit dihindari (keterangan dari wawancara dengan Hakim Anggota dalam Perkara Nomor 28/Pid.B/PN-Srg) Sehingga ketidak mampuan para debitur untuk membayar kembali hutang atau kredit yang telah mereka nikmati, menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan kedua belah pihak, yaitu dengan timbulnya kredit bermasalah.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah yang

diperkirakan pada saat pemberian kredit yang dinilai dapat ditolerir. Oleh karena itu, kreditur harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu, dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus itu (Siswanto Sutojo, 2008:13).

Pada banyak kasus yang terjadi, ketidak mampuan membayar kembali ini, pada awalnya disikapi dengan baik oleh pihak *lessor*, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai upaya tersebut digunakan oleh *lessor* sebagai upaya penyelamatan bagi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Bagian dalam *lessor* yang dinamakan sebagai bagian *Collection*, bertugas mengurus semua usaha pengembalian tersebut. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak juga membayar hutang kreditnya kepada *lessor* walaupun *lessor* telah mengupayakan berbagai macam cara perbaikan sistem perkreditannya, demi pembayaran kembali hutang kredit tersebut oleh nasabahnya. Banyak alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah terkait dengan kemoloran pembayaran atau pun tidak dibayarnya sama sekali suatu hutang kredit oleh nasabah.

Ketika hal tersebut terjadi seharusnya pihak *lessor* melakukan penggugatan secara perdata kepada debitur karena dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati diawal terlepas dari asumsi bahwa sebenarnya pernjian tersebut banyak merugikan pihak debitur. Namun pihak *lessor* rata-rata merasa proses penggugatan secara perdata akan memakan waktu yang lama dan harus melalui sistem yang berbelit-belit sehingga acap kali mereka menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah piutang mereka (Keterangan dari wawancara dengan Hakim Anggota dalam Perkara Nomor 28/Pid.B/PN-Srg). Sehingga pihak *lessor* biasanya akan mengontak pihak ketiga yang menyediakan jasa penagihan. Biasanya bersifat perorangan, yang telah mempunyai suatu kesepakatan dengan *lessor* sebelumnya, yang mempunyai kemampuan tertentu untuk mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar tersebut dengan cara yang

lebih efektif. Apabila berhasil pihak ketiga tersebut akan mendapat balas jasa tertentu dari perusahaan, biasanya sebesar presentase tertentu dari jumlah tunggakan kredit dan bunga tertagih. Dalam hal penagihan kredit seperti itu, secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang, dari peraturan hukum, *lessor* pemberi kuasa tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi bilamana dalam melakukan penagihan kredit mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan debitur mengadukan hal itu kepada pihak yang berwajib, perusahaan *leasing* pemberi kuasa dapat terseret ikut memepertanggung jawabkan tindakan itu. Guna menghindari tindakan yang tidak menyengankan, sebelum memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk dan atas nama mereka menagih kredit, sebaiknya perusahaan *leasing* mempelajari bab 16, Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut secara khusus memuat berbagai macam hal yang berangkutan dengan sifat pemberi kuasa, kewajiban dari yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa serta cara berakhirnya cara berakhirnya pemberian kuasa. Pada prakteknya, tindakan pihak ketiga banyak yang menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan *leasing* . Banyak ditemui debitur yang mengeluhkan mengenai tata cara penagihan kredit dengan cara yang tidak manusiawi. Tindakan tersebut antara lain memenuhi unsur dari tindak pidana pemerasan, karena saat melakukan penarikan maupun penagihan hutang kredit debitur biasanya para penagih menggunakan tindakan yang pada intinya memaksa debitur untuk membayar atau pun menyerahkan barang leasing, namun terkadang mereka tidak mau mengakui bahwa tindakan mereka tersebut adalah tindakan yang melawan hukum. Karena mereka mengatas namakan tugas dan jabatan mereka sebagai alasan bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut mereka pandang sebagai tindakan yang wajar untuk memberikan semacam peringatan kepada debitur agar mereka segera melunasi hutang kredit mereka pada pihak *lessor*.

Persoalannya ketika hal tersebut di atas terjadi lapangan, sangat sedikit debitur yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan debitur sendiri mempunyai rasa takut, karena notabene mereka juga mempunyai kesalahan, yaitu belum melunasi hutang kreditnya pada perusahaan *leasing*.

Dan ketika suatu persoalan mengenai tata cara penagihan kredit *leasing* yang kurang manusiawi karena mengandung unsur pemerasan terjadi, ketika pihak *leese* melapor pada pihak berwajib banyak ditemui fakta bahwa akhirnya kasus tersebut berhenti pada kesepakatan damai sebelum sampai ke Persidangan di Pengadilan, entah damai disini adalah arti kata damai yang sebenarnya atau damai yang dipaksakan dari salah satu pihak. Yang jelas penerapan hukum bagi penagihan yang tidak manusiawi selama ini penulis rasa masih sangat jauh bila dikaitkan dengan rasa keadilan dan tegaknya hukum yang berlaku.

Berawal dari kegelisahan penulis akan hal tersebut kemudian penulis mengadakan penelitian ke berbagai kalangan yang berhubungan dengan dengan sistem penagihan hutang kredit, yang berpotensi disertai dengan tindakan pemerasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap banyak subjek yang dianggap mempunyai kaitan erat dengan fenomena penagihan hutang kredit di masyarakat, penulis mendapatkan suatu kasus yang dilakukan oleh pihak ketiga dari suatu lembaga *leasing*. Dimana tindakan tersebut memenuhi unsur dari tindakan pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilaporkan oleh saksi kejadian tersebut ke pihak berwajib, dan pada akhirnya disidangkan, hingga mendapat putusan resmi dari Pengadilan Negeri Sragen. Disanalah satu-satunya tempat dimana penulis mendapat keterangan yang pasti dan gamblang mengenai kegelisahan penulis tersebut. Hingga penulis dapat mempelajari mengenai perkara pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengadakan suatu *research* atau penelitian mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak ketiga dari perusahaan *leasing*. Serta bagaimana

putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dan setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau lebih lanjut mengenai : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).

B.

Perumusan Masalah

Sebagai usaha dalam melakukan suatu penelitian yang lebih baik, terstruktur, terarah, serta agar lebih mudah memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan masalah ini dalam dua kerangka pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Perkara Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat. Penulis mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Perkara Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Secara bersama-sama yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak ketiga dari lembaga *leasing* atau pihak penyedia jasa tagihan, dalam KUHP;

- b. Mempelajari Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Secara bersama-sama dalam kasus tersebut.

2. Tujuan Subjektif

- a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai tindakan pidana yang mungkin terjadi dibalik penagihan hutang kredit;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai kemungkinan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama;
- c. Menggali, mengkaji, dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut;
- d. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai pemahaman hukum pidana dalam teori dan praktek di lapangan;
- e. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, serta bagi pembaca, sehingga akan memperkaya khasanah pengetahuan, utamanya di bidang hukum pidana. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dengan selesainya penelitian ini maka akan ada manfaat pada pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan baru bagi pengguna fasilitas kredit sewa guna usaha atau *leasing*, pelaku pekerjaan penagih hutang kredit, maupun yang mempunyai tugas yang erat kaitannya dengan penagihan kredit macet.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi dan acuan bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat yang sama dengan penulis untuk mengkaji permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai persoalan yang penulis angkat pada penelitian ini.
- b. Sebagai bahan masukan dan sebagai referensi bagi pihak terkait.

E. Metode Penelitian

Suatu penulisan, dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan, dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006:6)

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian dengan jenis empiris. Yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian hukum ini penulis

menjelaskan secara objektif mengenai dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak ketiga dari lembaga *leasing* dalam menagih hutang kredit. Dan penulis telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sragen.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2007:10)

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto (1986:10) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal maupun normative dan bukan dalam bentuk angka-angka. Dan pendekatan tersebutlah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hokum ini. Yaitu dengan mendasarkan pada info dan data yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara lisan maupun tertulis. Serta dengan mengamati perilaku yang nyata untuk kemudian dipelajari dan ditelaah.

4. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sragen. Beralamat di Jalan Raya Sukowati Nomor 253, Sragen. Dimana pemilihan lokasi tersebut dilakukan

karena di lokasi tersebut terdapat data mengenai perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa penagihan dari lembaga *leasing*.

5. Jenis Data

Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama disebut dengan data primer atau data dasar (*primary data*), dan data yang kedua dinamakan sebagai data sekunder (*secondary data*) (Soerjono Soekanto, 1986:12). Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari nara sumber melalui wawancara maupun dari fakta yang diamati secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari Pengadilan Negeri Sragen.

b) Data Sekunder

Data ini adalah keterangan, info, dan fakta yang diperoleh bukan secara langsung dari nara sumber yang ada di lapangan melainkan dari studi kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literature, peraturan Perundang-undangan dan sebagainya. Yang tentunya mempunyai relevansi dengan topic yang akan penulis bahas pada penelitian hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.

6. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian (Peter

Mahmud Marzuki, 2008:14). Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, antara lain:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang sangat menunjang dalam penulisan hukm ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Yang terdiri dari keterangan maupun data yang diperoleh dari hakim yang memutus perkara Nomor 28/Pid.B/2009/PN.Srg.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh bukan secara langsung oleh nara sumber di lapangan. Dalam praktanya sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan, yang sifatnya dapat mendukung data primer, yang terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti perturan perundang-undangan. Meliputi:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hokum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- (a) Salinan Putusan dan Berita Acara Persidangan perkara Nomor 28/Pid.B/2009/PN.Srg;
- (b) Buku-buku yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat, dalam hal ini buku yang banyak memuat topik tersebut adalah buku-buku hukum dan ekonomi;

(c) Hasil penelitian para sarjana dan kaum cendekiawan;

(d) Literature dan hasil penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang member petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001:113)

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti yang bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soejono dan Abdurrahman, 2003:46). Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan (Burhan Asafa, 2004:59)

b) Studi Pustaka

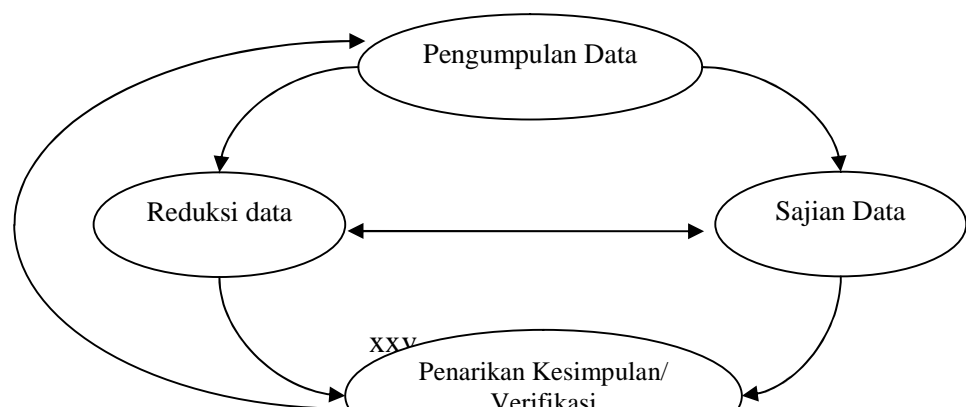
Penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari segala bahan seperti buku, majalah, literature, tulisan ilmiah, undang-undang, internet dan lain sebagainya,

yang terdiri dari data di bidang ilmu hukum ,dan bidang ilmu ekonomi yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai perkara tinadak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yang penulis angkat.

8. Teknik Analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data, perlu adanya suatu teknik penganalisisan data yang tepat, agar data yang telah penulis kumpulkan dapat diolah dengan tepat untuk menghasilkan suatu penelitian hukum yang sempurna dan baik.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J.Maleong, 2002:103). Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dalah model analisis interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dai tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam teknik analisis ini penulis bergerak dalam tiga komponen analisis, selama pengumpulan data berlangsung, hingga saat pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis tersebut, hingga waktu yang tersisa bagi penelitian berakhir sudah. Dimana model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.

Komponen-komponen Analisis Model Interaktif

(H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*)

Keterangan :

a) Reduksi Data

Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat pengumpulan data berlangsung. Reduksi data ini dilakukan dengan membuat singkatan, memusatkan tema, menuliskan memo, dan menentukan bata-batas permasalahan. Proses seleksi, pemfokusan, dan penyerdahanaan dan abstraksi data dan transformasi data kasar yang munsul dari catatan tulis di lapangan. Proses reduksi data dilakukan hingga penelitian dan penulisan hukum ini berakhir.

b) Penyajian data

Merupakan suatu rangkaian informasi , deskripsi yang dibuat dalam bentuk suatu pemaparan atau narasi hingga memungkinkan dibuatnya suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung (Mathew B. Miles dan A. Bichael Huberman dalam Tjejep Rohendi, 1992:19). Dengan menggunakan model analisis data kualitatif maka akan didapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian

- d) Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengolah data :
- (1) Melakukan pengumpulan data, baik berupa data primer, sekunder, maupun tersier dengan mengadakan observasi secara langsung ke lapangan maupun melalui bahan kepustakaan dan lain sebagainya;
 - (2) Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk sajian data yang masih merupakan data yang sifatnya masih dapat berubah;
 - (3) Data yang tidak disajikan, dibuang sementara namun tetap ditampung dalam reduksi data.
 - (4) Dari data yang telah terkumpul dapat dibuat hipotesa yang selanjutnya akan memudahkan untuk menarik sebuah kesimpulan dari apa yang telah dibahas sebelumnya dan dikuatkannya hipotesa yang ada dengan adanya data yang terkumpul;
 - (5) Apabila sebelum menarik kesimpulan dirasa ada yang kurang dengan data yang disajikan, maka dari penyajian data dapat dilengkapi dengan data yang telah ada dengan menengok kembali data yang ada di reduksi data;
 - (6) Setelah selesai pengkajian ulang terhadap semua data maka ditarik kesimpulan;
 - (7) Apabila setelah ditarik kesimpulan tetap dirasa ada yang kurang dengan data, maka dapat kembali menilik data yang ada di reduksi data ataupun kembali menengok ke data awal;
 - (8) Semua proses ini dimaksudkan agar dalam menyajikan data dan menarik kesimpulan, tidak ada data yang tertinggal, sehingga penelitian bersifat akurat.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan dibagi dalam sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memahami materi, yang akan dirinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis akan mengemukakan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul. Pada bab II memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

B. Kerangka Pemikiran

Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh oleh Penulis, yang dituangkan dalam bentuk skema/bagan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, Penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai pengaturan dan dasar hukum bagi pemidanaan terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Serta mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan nomor 28/Pid.B/2009/PN.Srg.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang Penulis berikan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu (Adami Chazawi, 2002:67).

Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Martiman P, 1996:16).

Karni memberi pendapat bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan (Sudarto, 1990:42).

Sedangkan arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman (R.Subekti, dan Tjitrosoedibio, 2005:35).

Simons, mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Simons, 1992:127).

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *starfbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *starfbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan (P.A.F Lamintang, 1997:181).

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bawasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut P.A.F Lamintang, penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:
 - (9) Melanggar hukum atau *wederechtelijk*;

- (10) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- (11) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:

- (1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- (4) Perasaan takut atau *vrees*;
- (5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Adami Chazawi, membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam

suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat.

Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

b) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukm pidana materiil.

Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 10 Th 1998 tentang tindak pidana perbankan

g) Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya dapat Dilakukan Orang Tertentu.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam

undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut.

Selain itu dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada pasal 342 tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak,

Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

i) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada undang-undang.

Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur

yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya. Yang biasanya berimbang pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

j) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

k) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja.

Sedangkan pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada pasal 296 tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

2. Tinjauan Umum tentang Pemerasan

a. Pengertian

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pemerasan dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran –an

Kata peras sendiri mempunyai arti :

- a) mengambil untung banyak-banyak dari orang lain
- b) meminta uang dengan ancaman.

Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras.

(http://www.kamus-besar-bahasa-indonesia/online/kamus/gratis.php?hasil=sukses_id_11#hasil)

- 2) Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing*. Yaitu:

- a) Tindak pidana pemerasan

(www.kamushukum.com/KH_entris.php?af_in)

- b) Pemerasan.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang adapada pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*afpersing*” atau “pemerasan” (R.Subekti,2005:7)

- c) Dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras. (Wirjono Projodikoro,2008:27)
- d) Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-

nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

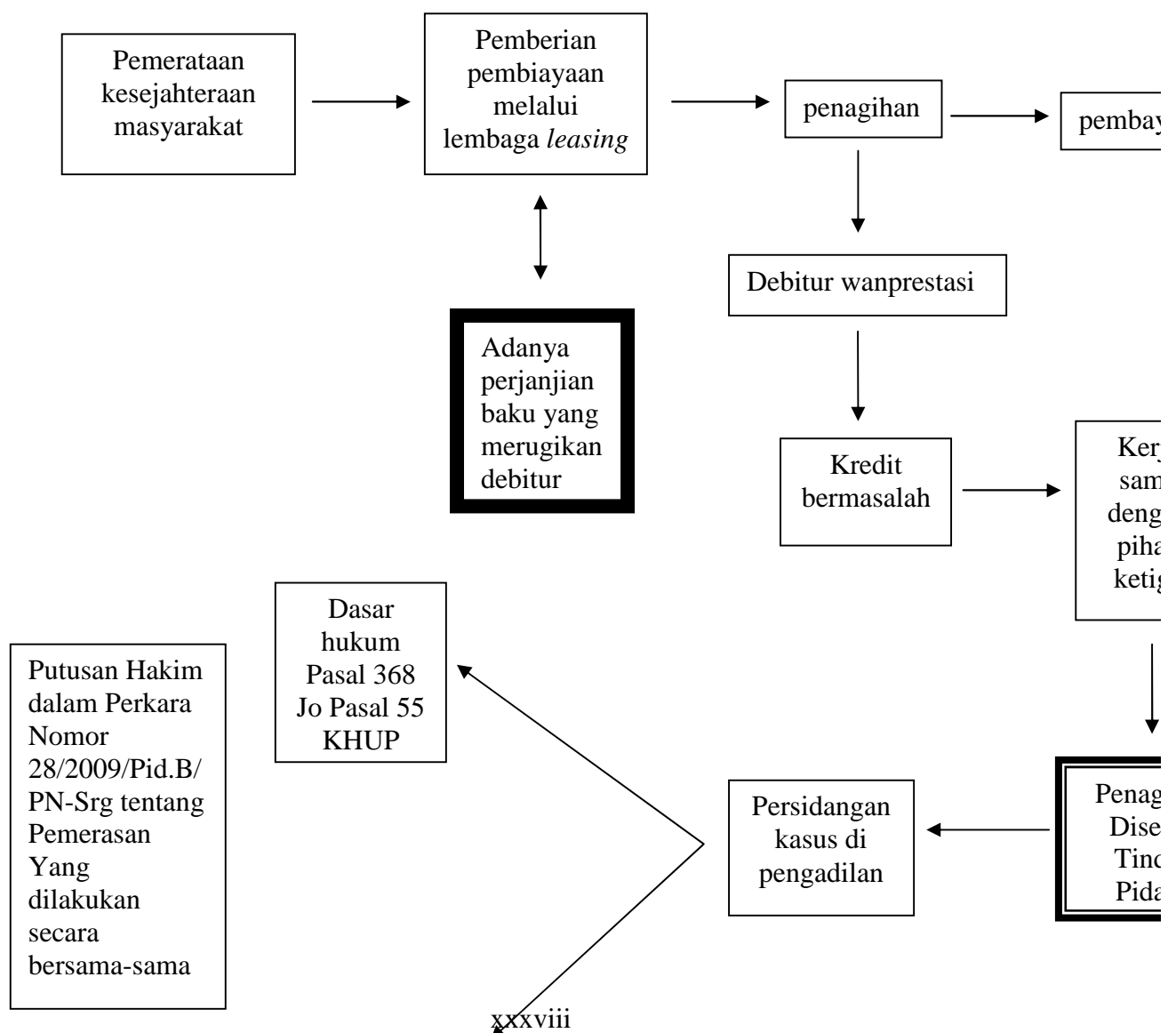
<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=nl&u=http://www.elfri.be/Strafrecht/afpersing.htm&ei=AjlfSunEGI2pkAWXobyoCg&sa=X&oi=>

b. Unsur pemerasan :

- 1) perbuatan
- 2) memaksa orang lain
- 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4) menyerahkan barang kepada si pemeras

dari ketiga unsur pokok ini dapat kita simpulkan bahwa pemerasan adalah suatu perbuatan dimana si pelaku harus mengadakan suatu upaya pemaksaan agar si korban mau menyerahkan sendiri objek yang ingin dikuasai oleh si pemeras. Korban yang di desak oleh perasaan takut dan terpaksa akan dengan spontan memberikan barang yang awalnya ada pada penguasaannya. Terlebih apabila cara yang dilakukan menggunakan kekerasan yang akan menimbulkan efek takut yang lebih besar kepada korban. Di sini perbedaan antara pemerasan dan pencurian terlihat jelas, dimana pada pencurian terkadang si korban tidak tahu atau tidak menyadari bahwa barangnya telah diambil oleh orang lain, namun dalam tindak pidana pemerasan terdapat ironi tersendiri dimana si korban harus menyerahkan sendiri dengan tangannya barang yang ia miliki kepada pemerasnya.

Kerangka Pemikiran



Pertimbangan Hakim

KETERANGAN

Sebagai suatu usaha untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi banyak muncul lembaga pembiayaan yang salah satu bentuknya adalah perusahaan *leasing*. Banyak masyarakat yang dimanjakan dengan kemudahan fasilitas yang disediakan oleh lembaga *leasing*. Sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat kelemahan pada perjanjian dengan lembaga leasing yang terletak pada perjanjian baku yang disepakati di awal, yang sebenarnya mempunyai banyak resiko bagi pihak debitur. Dari banyaknya masyarakat yang turut serta menggunakan fasilitas ini ternyata tidak semua dapat melakukan pengembalian atau pembayaran atas hutang kredit yang muncul karena telah membuat kesepakatan sewa beli dengan perusahaan *leasing*. Dari sinilah kemudian timbul masalah mengenai kredit yang membuat pihak perusahaan *leasing* menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pembayaran hutang kredit yang dinilai dapat memudahkan pengembalian piutang mereka pada nasabah. Pihak ketiga yang diberi tugas untuk menagih ternyata banyak

melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan banyaknya hal yang kemudian dianggap sebagai tindak pidana oleh debitur. Hingga akhirnya ada debitur yang melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib. Dan selanjutnya perkara tersebut diproses secara hukum.

Dalam perkara yang selanjutnya penulis teliti tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa penagihan hutang kredit adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Dimana hal tersebut ada dalam Putusan Hakim No. 28/2009/Pid.B/PN-Srg, yang dijatuhkan setelah perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur dari Pasal 368 Jo Pasal 55 KUHP mengenai pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan melalui pertimbangan hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan. Yang dalam kasus ini penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Sragen. Dari hasil penelitian baik secara wawancara maupun melalui data yang penulis peroleh secara langsung yaitu berupa Putusan Hakim dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara Nomor 28/Pid.B/2009/PN.Srg, didapat data sebagai berikut :

Perkara tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa ANDI TRIYONO bin SUKIMAN DKK.

a. Identitas

1) Terdakwa pertama:

Nama Lengkap : ANDI TRIYONO bin SUKIMAN
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 28 maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Sangkrah RT02/07, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

2) Terdakwa Kedua:

Nama Lengkap : ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL
Tempat Lahir : Ambon
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 13 maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :Dk. Sumber
Jl.Kutai 3 No 2 RT03/07
Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

b. Kasus Posisi

- 1) Terdakwa Andi Triyono adalah seorang Debt Collector Freelance pada Perusahaan Finance Leasing Adira cabang Sragen. Ia telah beberapa kali mendapat tugas untuk menagih hutang kredit nasabah Adira Finance. Pada bulan November 2008, ia memperoleh tugas untuk menagih hutang kredit Sepeda Motor Vega R atas nama Hartatik yang beralamat di Dukuh Gumuk Rejo, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen,dengan Nomor Polisi AD 2913 GE, dan Sepeda Motor Smash atas nama Mulyatno yang beralamat di Dukuh Doyong, Desa Doyong,

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, dengan Nomor Polisi AD 5696 MY. Untuk penagihan tersebut terdakwa mendapat Surat Tugas untuk menagih yang dapat berfungsi pula sebagai Surat Kuasa untuk menarik unit Sepeda Motor apabila debitur tetap tidak mau membayar tagihan hutang kreditnya. Surat tersebut ditanda tangani oleh Manajer PT. Adira Finance Cabang Sragen, dan hanya berlaku bagi satu unit sepeda motor. Apabila terdakwa dapat menagih piutang tersebut, atau dapat menarik kembali sepeda motor yang kreditnya macet tersebut, maka ia akan mendapat imbalan sebesar Rp 750.000,00 per unit sepeda motor.

- 2) Pada tanggal 17 November tersebut, ia menghubungi temannya Ongen Latul yang juga merupakan *Debt Collector* Adira Finance, namun untuk wilayah Surakarta. Ia meminta bantuan kepada Ongen untuk melakukan tagihan di dua tempat tersebut. Untuk memperlancar penagihan tersebut, Terdakwa II Ongen Latul juga menghubungi teman, yang dikenalnya dalam persatuan warga Ambon di Solo yaitu Rudiyanto Mustika yang juga menjadi saksi dalam kasus ini. Rudiyanto adalah seorang anggota AURI, sehingga kehadirannya dalam suatu penagihan diharapkan dapat membuat debitur menjadi lebih berpikir dan mau segera melunasi hutang kreditnya. Sebelumnya Rudiyanto sudah pernah diajak oleh terdakwa untuk menagih hutang kredit kepemilikan mobil pada nasabah di wilayah Gunung kidul, namun tidak berhasil mendapat uang cicilan serta tidak dapat menarik kembali mobil yang kreditnya macet tersebut. Setelah itu Rudiyanto menelepon temannya sesama TNI yang bertugas di Kodim Wonogiri, yang bernama Handoko. Ia menagajak Handoko yang telah selesai melakukan piket, untuk ikut serta dalam penagihan tersebut.
- 3) Para terdakwa, saksi Rudiyanto dan saksi Handoko berkumpul di rumah Ongen Latul, mereka membahas tata cara penagihan yang akan mereka lakukan. Pada kesempatan tersebut, Rudiyanto tidak

membawa senjata, begitu pula para terdakwa, namun Handoko membawa senjata api yang memang dimilikinya sebagai seorang anggota TNI. Di rumah Ongen, Handoko telah memperlihatkan senjata apinya kepada Rudiyanto dan para terdakwa.

- 4) Untuk selanjutnya mereka berangkat menuju rumah debitur pertama yaitu Hartatik di Dukuh Gumuk Rejo, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Disana mereka bertemu dengan orang tua dari Hartatik, dan mendapat penjelasan bahwa sebenarnya yang melakukan kredit sepeda motor di Adira Finance adalah temannya yaitu Sukidi, namun menggunakan identitas anaknya Hartatik, sehingga di surat kuasa penagihan pun ditulis bahwa sepeda motor tersebut atas nama Hartatik. Dari sana kemudian mereka berempat diantar ke rumah Sukidi di Dukuh Sidorejo RT 14, Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Disana mereka bertemu dengan Sukidi dan segera menjelaskan tujuan mereka datang kesana. Mereka hendak menagih hutang kredit sepeda motor atas nama Hartatik yang pada angsuran 1-6 lancar, namun kemudian terjadi tunggakan pembayaran dari bulan ke 7-13. Namun Sukidi kemudian menolak untuk melakukan pembayaran karena ia mengaku belum mempunyai uang. Terdakwa kemudian berniat untuk mengambil motor Vega R tersebut, namun pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak ada di TKP, karena memang sedang dibawa oleh anak dari Sukidi ke Surabaya. Menyadari hal ini terdakwa menjadi marah, dan kemudian merampas motor yang ada di rumah saksi Sukidi yaitu motor Tossa dengan nomor polisi W 5010 LJ. Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut akan dijadikan barang jaminan sebelum saksi dapat melunasi tunggakan kreditnya. Setelah itu terdakwa juga membuat perjanjian tentang diambilnya motor Tossa tersebut sebagai barang jaminan. Selepasnya motor Tossa tersebut dirampas oleh terdakwa, saksi Handoko keluar

rumah sambil meledakkan senjata api yang ia bawa dengan maksud untuk membuat saksi Sukidi menjadi takut, dan hal tersebut ternyata memang benar-benar Sukidi dan istrinya yang saat itu juga berada di TKP menjadi sangat ketakutan.

- 5) Setelah merasa telah menyelesaikan tugas di rumah Sukidi, mereka berempat kemudian menuju ke rumah MULYATNO yang atas namanya telah dikredit sebuah sepeda motor Smash dengan NO Pol AD 5696 MY. Di rumah Mulyatno mereka mendapat keterangan yang sama dengan yang di dapat di rumah Hartatik, bahwa sepeda motor tersebut memang benar atas nama Mulyatno tapi sebenarnya yang mengurus dan bertanggung jawab untuk masalah perkreditannya adalah Ir. Agung Purnomo yang merupakan atasan dari Mulyatno yang bekerja pada perusahaan mebel milik Ir. Agung Purnomo. Mereka kemudian diantar oleh Mulyatno menuju ke rumah Ir. Agung Purnomo di Dukuh Doyong RT 10, Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Disana mereka hanya dapat menemui pembantu dan anak dari Ir. Agung, karena ia dan isterinya saat itu sedang pergi ke Solo. Disana mereka kembali melakukan aksi kekerasan dan pengancaman, namun karena memang sama sekali tak memahami duduk perkaranya maka pembantu dan anak-anak Ir. Agung hanya biasa menangis ketakutan, terlebih ketika mereka mengetahui bahwa Handoko membawa senjata api. Setelah itu datang ke TKP beberapa orang yang kemudian juga memberikan kesaksiannya di muka persidangan, antara lain Suwartono bin Sardi, Taufik Tri handoyo, Edris Slamet bin Sugiman. Namun kedatangan mereka tampaknya tidak dapat menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa. Bahkan Handoko berkali-kali mengancam orang-orang yang ada di rumah tersebut dengan kata-kata “apa kalian mau kakinya tak tembak” dan juga ia menanyakan apakah bosnya yaitu Ir. Agung sudah tidak mempan lagi terhadap peluru. Kemudian

salah satu pembantu Ir. Agung menelepon dan memberitahukan perihal tersebut kepada majikannya itu, dan Ir. Agung pun segera menindak lanjuti hal tersebut dengan menelepon kantor Adira Cabang Sragen tempatnya mengambil kredit sepeda motor. Namun pihak Adira sama sekali tidak tahu menahu mengenai hal ini, mereka mengatakan memang telah membuat surat kuasa penagihan, namun tidak tahu menahu mengenai waktu penagihan dan tindakan yang terjadi dalam penagihan. Mengetahui hal ini Ir. Agung pun segera menelepon Poltabes Surakarta dan dihubungkan dengan Polres Sragen. Petugas kepolisin Sragen tampaknya segera bertindak mendengar laporan yang masuk tersebut. Dan segera datang ke TKP, sehingga para terdakwa bisa di tangkap sebelum mereka sempat merampas kendaraan Smash NO pol AD 5696MY yang menjadi sengketa tersebut.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

----- Bahwa mereka terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL dengan RUDIYANTO dan HANDOKO (disidangkan dalam perkara Denpom) secara bersama-sama dengan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 November 2008 sekitar jam 15.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, bertempat pertama di Dukuh Sidorejo RT 5/14 Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dan yang kedua di Dukuh Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang yang bernama Sukidi dan Ir. Agung Purnomo dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang berupa sepeda motor Tossa W 5010 LJ yang sama sekali

atau sebagian kepunyaan saksi Sukidi atau setidaknya kepunyaan orang lain saksi para terdakwa, perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mula-mula terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL mendapat tugas dari kantor ADIRA Sragen atau menggunakan jasa para terdakwa dengan surat tugas untuk menagih/menarik kredit angsuran macet dari ADIRA dengan imbalan apabila berhasil menarik sepeda motor mendapat jasa dari adira sebesar Rp 750.000,00 kemudian mereka para terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No Pol AD 2622 YS sedangkan Handoko berboncengan SPM dengan Rudiyanto dengan tujuan bersama-sama ke rumah Sukidi yang kredit SPM nya macet 5x di Adira setelah mereka berempas sampai di rumah Sukidi kemudian menagih kredit SPM yang macet 5x, waktu itu saksi SUKIDI mengatakan kepada para terdakwa “sabar dulu minta waktu beberapa hari” oleh para terdakwa dijawab “tidak ada alasan-alasan” maka para terdakwa tetap memaksa saksi Sukidi untuk membayar angsuran yang macet sekarang juga, berhubung saksi Sukidi tidak mempunyai uang, para terdakwa lantas menanyakan sepeda motor Vega R yang dikredit di Adira oleh saksi Sukidi dijawab “bahwa SPM tidak ada di rumah karena di bawa anaknya ke Surabaya” kemudian terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin

SUKIMAN,terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL, serta ANDOKO dan RUDIYANTO meminta secara paksa dengan emosi sambil membentak-bentak saksi SUKIDI, karena pada waktu itu di rumah yang ada SPM Tossa milik saksi Sukidi maka SPM tersebut dibawa sebagai jaminan kredit yang macet, waktu itu saksi sukidi mempertahankan dan tidak boleh para terdakwa membawa SPM Tossa, karena salah satu orang mengeluarkan senjata api dan ditembakkan/diledakkan maka saksi Sukidi ketakutan dan membiarkan SPM Tossa tersebut dibawa oleh para terdakwa, setelah berhasil membawa SPM Tossa mereka terdakwa kemudian meninggalkan saksi Sukidi, kemudian mereka berempat menuju ke rumah MULYATNO Dukuh Dayung, Desa Miri, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang juga kredit angsurannya macet selama 6 bulan karena sudah beberapa kali dicari tidak ketemu maka terdakwa ANDI TRIYONO bin SUKIMAN menyuruh HANDOKO dan RUDIYANTO dengan maksud agar MULYATNO sebagai atas nama kredit Ir. AGUNG PURNOMO perlu dikerasi dan ditekan agar sepeda motor Smash dikredit dari Adira tersebut dapat ditarik lalu mereka berempat menuju ke rumah Ir. Agung Purnomo yang kebetulan MULYATNO menjadi pegawai di rumah tersebut setelah itu sampai di rumah Ir. Agung Purnomo para terdakwa menakut-nakuti MULYATNO dan teman-teman dengan memegang senjata api di tangan sambil mengatakan kepada orang-orang yang digiring “hayo podo mlebu apa mau

kamu tak pistol kakinya” kemudian senjata api milik Handoko diletakkan di pinggangnya dan digunakan untuk mengancam orang-orang dan juga mengatakan lagi “apa bosmu maksudnya Ir.Agung pa sudah tidak tedas sama pistol” belum sempat para terdakwa membawa SPM Smash yang kreditnya macet itu terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN terdakwa (II) ONGEN LAUTL bin NIKOLAS LATUL serta HANDOKO dan RUDIYANTO ditangkap petugas Polisi dari Polsek Miri;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

e. Fakta hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan

- 1) Saksi Sukidi merupakan nasabah Adira Finance, mengambil kredit sepeda motor, Vega R No Pol AD 2913 GE dengan uang muka Rp. 1.700.000,00 dan angsuran sebesar Rp. 380.000,00 yang harus dibayar setiap bulannya dalam kurun waktu 4 tahun. Ia mengadakan perjanjian kredit dengan PT. Adira atas nama Hartatik, yang notabene adalah anak dari temannya, Sugiman. Sehingga ketika ada masalah dengan tunggakan pembayaran kredit, yang ditagih adalah Sukidi, dan karena ada kesalahan dari terdakwa maka yang ditarik adalah motor milik Sukidi.
- 2) Saksi Sukidi dikatakan lancar dalam pembayaran kredit dari bulan pertama sampai bulan ke enam, namun mulai menunggak pada bulan ke tujuh hingga bulan ke 13.
- 3) PT. Adira telah mengirimkan surat peringatan dan surat teguran atas keterlambatan pembayaran tersebut, namun dialamatkan kepada Hartatik yang namanya digunakan sebagai debitur,

sehingga saksi Sukidi tidak mengetahui adanya surat teguran tersebut.

- 4) Karena keadaan ini, maka PT. Adira bermaksud melakukan penagihan tunggakan kredit dan atau penarikan unit sepeda motor yang dikredit tersebut apabila debitur telah benar-benar tidak dapat melunasi kredit motornya tersebut.
- 5) PT. Adira mengadakan perjanjian dengan seorang pihak ketiga untuk melakukan penagihan , yang telah biasa melakukan kerjasama dengan PT. Adira, yaitu terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN, yang menurut keterangan dari terdakwa telah berhasil melakukan penarikan sepeda motor sebanyak kurang lebih 40 buah tanpa adanya masalah yang terjadi.
- 6) PT. Adira Cabang Sragen tidak mengadakan perjanjian maupun memberikan surat kuasa kepada terdakwa II Ongen Latul bin Nikolas Latul.
- 7) Dalam perjanjian tersebut selain dijelaskan mengenai surat tugas untuk melakukan penagihan dan surat kuasa untuk melakukan penarikan terhadap sepeda motor, juga dibahas mengenai *fee* atau imbalan yang akan didapat oleh terdakwa apabila berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu sebesar Rp. 750.000,00.
- 8) Setelah adanya perjanjian tersebut, PT. Adira memberikan surat kuasa, tanda terima, dan tanda setoran macet. Dalam surat kuasa dijelaskan bahwa kewenangan terdakwa hanyalah sebatas menarik sepeda motor yang menunggak setoran pembayaran kreditnya. Surat kuasa ditanda tangani oleh Manager PT. Adira Cabang Sragen.
- 9) Ada batasan-batasan yang telah disampaikan PT. Adira kepada pihak ketiga untuk menarik sepeda motor yang kreditnya macet tersebut, dan tidak boleh dengan kekerasan.
- 10) Tidak ada perintah dari PT. Adira untuk membawa alat ataupun senjata api saat pihak ketiga melakukan penagihan

- 11) Saksi Suharsono bin Suyoto yang merupakan Kepala Cabang Adira Finance Sragen menyebutkan bahwa dalam perjanjian tidak ada perintah untuk mengambil sepeda motor yang lain apabila sepeda motor yang hendak ditarik tidak dapat ditemukan oleh terdakwa.
- 12) Ketika akan melakukan penagihan terdakwa tidak pernah meminta ijin, setelah mendapat surat kuasa, namun hanya melakukan semacam konfirmasi ketika akan menjalankan tugas.
- 13) Pada hari Senin tanggal 17 November 2008, terdakwa I mengajak terdakwa II yaitu ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL yang merupakan *debt collector* Adira wilayah Surakarta untuk melakukan penagihan.
- 14) Terdakwa II menghubungi temannya seorang anggota TNI AURI yang sebelumnya pernah ia ajak untuk menagih tunggakan kredit mobil di daerah Gunung Kidul, yaitu Rudiyanto.
- 15) Rudiyanto juga menghubungi temannya yang juga anggota TNI yang bertugas di Kodim Wonogiri, yaitu Handoko untuk diajak turut serta melakukan penagihan.
- 16) Terdakwa maupun saksi Rudiyanto tidak membawa alat khusus untuk melakukan penagihan akan tetapi saksi Handoko telah menunjukkan senjata yang ia bawa kepada terdakwa I dan II serta saksi Rudiyanto sebelum melakukan penagihan.
- 17) Para terdakwa serta kedua saksi melakukan penagihan ke rumah Hartatik dan kemudian diantar ke rumah saksi Sukidi.
- 18) Setelah tidak berhasil menagih maupun menarik sepeda motor Vega R No Pol AD 2913 GE terdakwa I mengambil secara paksa sepeda motor Tossa No Pol W 5010 LJ
- 19) Ketika beranjak keluar dari rumah saksi Sukidi, saksi Handoko meledakkan senjata api yang sebelumnya telah ia gunakan untuk menakut-nakuti saksi Sukidi, dan saksi Yatin

20) Mulyatno hanyalah pemakai dan pemilik identitas yang digunakan dalam persyaratan kredit, sedangkan yang bertanggung jawab atas kredit motor tersebut adalah Ir. Agung Purnomo yang merupakan atasan dari Mulyatno

21) Di TKP kedua terdakwa melakukan pembentakan dan pengancaman kepada pembantu dan anak-anak dari saksi Ir. Agung Purnomo. hingga menangis karena ketakutan. Namun baik terdakwa maupun kedua saksi yang turut serta melakukan penagihan tidak masuk ke dalam rumah melainkan hanya sebatas duduk atupun berdiri di teras rumah.

22) Yang dilakukan saksi Handoko Di TKP ke 2 :

a) Menunjukkan senjata api yang ia bawa kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut dengan tujuan menakut-nakuti, namun tanpa meledakkannya seperti yang ia lakukan di TKP pertama;

b) Mengatakan kepada saksi Mulyanto “apa kepala bosmu sudah tidak mempan pluru?”

c) Mengatakan kepada saksi Taufik Tri Handoyo “hei berhenti dulu” dengan maksud untuk mencegah saksi masuk ke rumah saksi Ir. Agung Purnomo.

d) Mengucapkan perkataan-perkataan tersebut dengan volume keras dan intonasi tertentu yang sifatnya mengancam.

Hingga dalam keterangan saksi yang diberikannya secara tertulis ia mengakui telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan serta pemerasan dengan ancaman kekerasan

23) Ketika terdakwa saksi Rudyanto serta saksi Handoko melakukan kekerasan di rumah Ir. Agung Purnomo, pembantu di rumah tersebut menelepon majikannya, dan selanjutnya Ir. Agung Purnomo menelepon PT. Adira untuk melakukan konfirmasi. Setelah itu Ir. Agung Purnomo juga menelepon Poltabes Surakarta dan dihubungkan dengan Polwil Surakarta dan Polsek Gemolong.

- 24) Selanjutnya sebelum saksi Ir.Agung Purnomo pulang ke rumah telah datang Petugas dari Polsek Miri, yang menangkap terdakwa serta kedua saksi rekan terdakwa yang ikut melakukan penagihan. Semua saksi yang berada di TKP juga turut serta dibawa ke Polsek Miri untuk dimintai keterangan pada saat itu juga
- 25) Ketika diperiksa di Polsek Miri, saksi Handoko sudah tidak membawa senjata api, dan setelah diadakan pemeriksaan ia mengakui memang membawa senjata api yang telah ia sembunyikan di rumah saksi Ir.Agung Purnomo.
- 26) Bukti berupa senjata api milik Handoko ditemukan oleh saksi Edris Slamet dan saksi Yuli Kurniadi di dekat tiang lumbung padi di depan rumah Ir.Agung Purnomo, malam setelah para saksi pulang dari Polsek Miri untuk dimintai keterangan oleh Polisi.
- 27) Ketika melakukan penagihan, saksi Rudyanto dan saksi Handoko yang merupakan anggota TNI sedang tidak dalam keadaan bertugas, tidak membawa nama jabatan, serta tidak membawa surat perintah dari atasan untuk melakukan hal tersebut.
- 28) Saksi Handoko merupakan anggota TNI AD anggota Kodim 0728 Wonogiri, dan atas kasus ini, juga akan menjalani Persidangan Militer di lingkungan kedinasannya, namun hingga persidangan kasus terdakwa belum dilakukan karena masih menunggu panggilan dari Denpom.

Dari kasus yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya penulis akan membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tersebut di PN Sragen.

f. Hasil Wawancara dengan pihak yang terkait.

- 1) Hakim Anggota dalam Perkara Nomor 28/Pid.B/2009/PN.Srg :

- a) Awal mula dari adanya kasus tindakan pemerasan oleh pihak ketiga dalam perjanjian kredit *leasing* adalah adanya perjanjian kontrak standart atau perjanjian baku yang mengharuskan kedua belah menyetujui isi perjanjian terlepas pada pemahaman akan isi perjanjian dan siapa pihak yang membuat perjanjian tersebut.
- b) Dari banyaknya klausula yang sebenarnya merugikan ini seharusnya calon debitur sudah memahami resiko yang mungkin timbul dari adanya suatu perjanjian *leasing*. Dalam dunia usaha dewasa ini sering kali muncul istilah *Take it or leave it*. Yaitu suatu ungkapan yang menghimbau kepada pihak pembuat perjanjian untuk tidak mengesahkan perjanjian apabila memang dirasa ada hal yang akan merugikannya dari perjanjian tersebut. Namun sekali lagi, gaya hidup konsumtif dan kurangnya pemahaman mengenai hukum bagi masyarakat Indonesia membuat mereka tidak berpikir panjang ketika akan membuat suatu perjanjian yang sebenarnya di kemudian hari akan menyusahkan mereka sendiri. Pada akhirnya yang terjadi hanyalah adanya kredit bermasalah yang pasti akan menimbulkan berbagai masalah baru yang sulit dihindari.
- c) Ketika hal tersebut terjadi seharusnya pihak *lessor* melakukan penggugatan secara perdata kepada debitur karena dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati diawal terlepas dari asumsi bahwa sebenarnya perjanjian tersebut banyak merugikan pihak debitur. Namun pihak *lessor* rata-rata merasa proses penggugatan secara perdata akan memakan waktu yang lama dan harus melalui sistem yang berbelit-belit sehingga acap kali mereka menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah piutang mereka.
- d) Pada saat akan menjatuhkan putusan seorang hakim tidak hanya memperhatikan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis yang sifatnya sudah pasti, namun juga memperhatikan hal lain yang

bersifat non yuridis. Hal ini dimaksudkan agar suatu putusan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa dalam waktu tertentu.

- e) Dalam menjatuhkan putusan dasar utama yang digunakan oleh seorang hakim adalah dakwaan dari JPU. Sedangkan mengenai lama pembedaan, sifatnya relatif, karena selain memperhatikan terbukti atau tidaknya dakwaan, juga diperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, namun tetap tidak mengesampingkan nilai keadilan karena hakekat hukum pidana adalah mencari keadilan.

2) Pelaksana tugas penagihan kredit bermasalah yang bekerja sama dengan leasing, yang berpotensi melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama:

- a) Pada saat diadakan kerja sama dengan perusahaan Leasing telah ada perjanjian mengenai segala hal terkait tata cara penagihan yang memang tidak mencantumkan kekerasan dan pemerasan dalam tata cara menagihnya.
- b) Dalam penagihan, biasanya debitur melakukan hal yang kurang menyenangkan, salah satunya dengan mengulur-ulur waktu pembayaran.
- c) Hal tersebut menyebabkan pihak ketiga yang melaksanakan penagihan menjadi tersulut emosi dan berpotensi melakukan tindak pidana pemerasan.
- d) Pada banyak kasus, debitur yang ditagih secara halus ternyata menyepelekan tagihan dan pada akhirnya benar-benar terjadi wanprestasi tanpa adanya pembayaran.
- e) Belajar dari hal ini maka saat mengadakan penagihan maka sering digunakan cara-cara yang sebenarnya telah mereka

ketahui melanggar hukum, salah satu contohnya adalah pemerasan terhadap debitur.

3) Masyarakat:

- a) Adanya pihak ketiga yang ditugaskan oleh perusahaan leasing membuat masyarakat pengguna jasa perusahaan *leasing* menjadi resah.
- b) Mekanisme penagihan yang notabene melanggar ketentuan dalam KUHP membuat masyarakat menjadi was-was jika akan menggunakan fasilitas kredit dari lembaga *leasing*.
- c) Adanya perasaan bersalah karena belum membayar hutang membuat masyarakat enggan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh para penagih tersebut.
- d) Ketika suatu kasus mengenai penagihan dapat diangkat ke publik, hingga akhirnya disidangkan di Pengadilan, sebagian besar masyarakat berharap agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dan hukuman yang berat. Hal ini selain agar membuat pelaku merasa jera dan menyadari kesalahannya, juga dimaksudkan agar orang lain dan pihak lain yang terkait juga lebih sadar hukum mengenai masalah penagihan hutang kredit.

**A. Pengaturan tindak pidana pemerasan yang dilakukan
secara bersama-sama di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan paling banyak digunakan untuk memutus suatu perkara pidana adalah Kitab Undang-Undang HuKum Pidana yang selanjutnya akan Penulis sebut sebagai KUHP. Dalam sebagian besar kasus yang terjadi dalam ruang lingkup hukum pidana, hakim

mengadili terdakwa menggunakan Pasal yang terdapat dalam KUHP.

Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Sudarto, 1990:16)

Sejak adanya UU No 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya UU no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materiil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air. Menurut Pasal VI UU no 1 tahun 1946, nama resmi dari KUHP awalnya adalah “Wetboek Van strafrecht voor Nederlandsch-Indie” yang diubah menjadi “Wetboek van Strafrecht” atau dapat pula disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Moeljatno, 2005 : v).

KUHP mempunyai aturan yang digunakan dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dimana yang disoroti oleh hukum pidana tidak hanya mengenai tindak pidana pemerasannya saja, melainkan juga mengenai kebersamaan beberapa orang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat 2 pasal yang bisa dikenakan dalam kasus tersebut, yaitu :

- a. Pasal 368 ayat (1) KUHP
- b. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berikut akan penulis sebutkan bunyi redaksional dari kedua pasal tersebut:

- 1) Pasal 368 ayat (1) KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

2) Pasal 55 ayat (1) KUHP :

“ dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Selanjutnya akan penulis kaji kata-perkata dalam pasal tersebut sebagai berikut:

2) Pasal 55 : (1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

Dalam bahasa aslinya yaitu Belanda pelaku kejahatan disebut sebagai *Dader*, yang disebut sebagai *dader* disini adalah pelaku. Namun terdapat kerancuan mengenai siapa yang sebenarnya disebut sebagai pelaku. Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP, yang harus dipandang sebagai *dader* bukan saja mereka “yang telah menggerakkan orang lain

untuk melakukan tindakan pidana”, melainkan juga “mereka yang telah menyuruh melakukan” dan “mereka yang telah turut melakukan suatu tindakan pidana”. Petikan Pasal 55 KUHP dalam bahasa aslinya berbunyi :

“Als daders van een strafbaar feit worden gestraf”

Diartikan bahwa pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang seharusnya disebut sebagai pembuat dalam suatu tindak pidana. Para pembuat undang-undang tersebut mungkin telah merasa bahwa siapa yang pantas disebut sebagai pelaku telah jelas adanya, namun dalam kenyataannya hal ini sangatlah sulit diterapkan dalam menentukan siapa sebenarnya yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. (PAF. Lamintang, :593)

Dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP terdapat beberapa jenis orang yang masuk dalam kualifikasi pelaku yaitu:

- i. Orang yang melakukan atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *pleger* ialah seseorang yang dengan sendirian telah melakukan perbuatan yang pada intinya mewujudkan segala elemen yang terdapat dari suatu peristiwa pidana
- ii. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan itu, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *doen plegen*. Disini sedikitnya terdapat dua orang yang melakukan, yang satu berlaku sebagai *pleger* dan yang satu berlaku sebagai *doen plegen*. Jadi bukan *doen plegen* sendiri yang melakukan tindak pidana

yang diinginkannya tetapi ia menyuruh *pleger* untuk melakukannya. Kebanyakan orang berlaku sebagai *doen plegen* agar apabila perbuatan pidana yang ia maksud pada akhirnya diketahui oleh orang lain dan harus dijatuhi hukuman pidana, ia tidak merasakan imbas dari pembedaan tersebut. Ada pula orang yang sengaja menjadi *doen plegen* dan menyuruh seorang *pleger* yang tidak dapat dihukum karena dinilai tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang antara lain sering terjadi dalam kasus antara lain :

- (1) seorang *doen plegen* menyuruh *pleger* untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana karena keadaan jiwanya perbuatan yang dilakukan oleh *pleger* tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44 KUHP
- (2) seorang *doen plegen* memaksa dengan ancaman yang disertai kekerasan kepada *pleger* untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Disini keadaan *pleger* terdesak dan ia dalam keadaan *overmacht*, sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena ia melindungi dirinya dengan adanya Pasal 48 KUHP.
- (3) *doen plegen* yang mempunyai kekuasaan karena jabatannya menyuruh *pleger* untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini seorang bawahan, terlebih bagi seorang militer wajib menjalankan segala perintah dari atasannya.

Disini *doen plegen* berharap perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipidana karena yang melakukan bukan ia sendiri melainkan melalui *plegernya*, dan si *pleger* akan membela diri dengan anggapan ia sedang melakukan perintah jabatan.

c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada tiga orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Seorang sebagai *doen pleger* yang menyuruh seorang *pleger* untuk melakukan tindakan pidana yang diinginkannya, kemudian si *pleger* mengajak orang lain yang akan turut serta melakukan atau disebut sebagai *medepleger* ini. *Medepleger* harus turut serta bersama *pleger* dalam melakukan perbuatan pidana secara langsung, jadi dalam peristiwa konkretnya ia turut serta melakukannya. Bukan sekedar membantu pelaksanaan persiapan perbuatan, karena bila demikian yang terjadi, maka terdapat pengistilahan tersendiri yang disebut sebagai membantu melakukan.

d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Orang itu harus secara sengaja membujuk orang lain, salah satu upayanya dapat dilakukan dengan memberikan suatu imbalan tertentu, atau dengan kekuasaannya ia dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam

hal ini terdapat dua orang yaitu si pembujuk dan si terbujuk. Apabila tindakan yang dilakukannya terbukti sebagai suatu tindak pidana dan oleh Pengadilan diproses kasusnya, maka si pembujuk tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut, namun si terbujuk dapat dikenai pidana. Hal ini terjadi karena pembujukan dan persetujuan atas hal yang dibujukkan harusnya melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga pihak terbujuk dinilai telah menyetujui perbuatan yang disuruhkan oleh si pembujuk kepadanya dan ia harus mempertanggung jawabkan persetujuan dan perbuatannya tersebut. Sedangkan hal-hal yang banyak digunakan untuk membujuk adalah :

(1) dengan pemberian atau janji. Yang tidak harus dalam wujud konkret seperti uang atau barang, namun dapat pula berupa kata-kata yang menjanjikan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh si pembujuk apabila si terbujuk telah berhasil melakukan apa yang diinginkan oleh si pembujuk kepadanya.

(2) menggunakan kekuasaan atau pengaruh. Dimana tidak dibatasi oleh kekuasaan yang timbul dari jabatan semata, namun dapat pula berupa kekuasaan yang timbul dari suatu hubungan misalnya dalam hubungan keluarga antara seorang suami kepada istrinya atau seorang ibu kepada anaknya.

(3) tipu daya. Dalam hal ini ada pembatasan dalam hal tipu daya yang digunakan. Sehingga yang

dibujuk tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena ia telah ditipu oleh si pembujuk dan ia tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana.

(4) memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan. Model ini dalam bahasa Belanda disebut sebagai *uitlokking*. Dalam hal ini terdapat kemiripan dengan *medeplichtig*, dimana sama-sama melibatkan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Perbedaannya adalah apabila dalam kasus dengan *medeplichtigh* yang melakukan adalah si pelaku sendiri namun dengan menggunakan fasilitas atau bantuan dari si orang lain. Maka pada kasus yang terjadi dengan *uitlokking*, yang memberi kesempatan atau fasilitas adalah si pelaku, namun ia menyarankan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukannya, sedangkan inisiatif melakukan tetap ada di diri si pelaku sendiri (R.Soesilo, 1996:73).

Mengenai hal ini Profesor Pompe berpendapat “yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Hal mana telah dikuatkan oleh Memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP adalah pelaku” (Pompe dalam PAF.Lamintang 1997:595)

Sedangkan Profesor Langenmeijer berpendapat mengenai Pasal 55 KUHP sebagai berikut “apabila orang

mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang-orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik. Adalah sudah jelas bahwa Undang-Undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menyuruh lakukan atau mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian seperti yang dimaksud di atas. Sebab apabila mereka itu harus pula melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaanya” (Langenmeijer dalam PAF.Lamintang, 1997:596).

Pendapat Profesor POMPE dan LANGEMEIJER ini tentulah berbeda, sehingga untuk menghindarkan pemberian arti yang berbeda-beda terhadap perkataan *dader* dalam Pasal 55 KUHP, Profesor Langemeijer menyarankan agar digunakan digunakan istilah *pleger* atau orang yang melakukan. Dan hal ini telah dilakukan, dengan pengistilahan *pleger* dalam pengertian pelaku dalam Pasal 55 KUHP.

2) Pasal 368

- a) ayat 1 : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau

menghapus piutang dihukum penjara paling lama sembilan tahun

Kejadian ini disebut sebagai *appersing* atau pemerasan dengan kekerasan. Dimana hal yang dilakukan oleh orang yang dikatakan sebagai pemeras adalah:

(1) Memaksa orang lain.

Yaitu melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

(2) Memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang.

Disini yang disebut sebagai barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak selalu mempunyai nilai ekonomis. Hewan juga merupakan hal yang dapat disebut sebagai barang dalam pengertian ini, karena hewan dapat digunakan sebagai objek perbuatan pidana pemerasan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan daya listrik dan gas dapat dimasukkan dalam kategori barang karena walaupun tidak berwujud secara nyata dan dapat dipegang secara langsung, namun gas dan daya listrik dapat dialirkan melalui suatu media untuk dipindahkan. Jadi terdapat kemungkinan dimana seseorang memeras orang lain untuk memberikan gas yang kemudian dimasukkan dalam suatu tabung, atau untuk memberikan aliran listriknya kepada si pemeras tersebut.

Sedangkan pengertian miliknya sendiri atau sebagian milik orang lain dapat diartikan sebagai barang yang mempunyai dua pemilik, dan kemudian salah seorang pemiliknya memaksa

pemilik yang satunya untuk meyerahkan barang itu sepenuhnya kepadanya, sehingga kepemilikan barang itu mutlak miliknya dan tidak perlu ia bagi dengan orang lain. Hal ini pada kasus konkret sering terjadi pada pembagian warisan, dimana ahli waris saling berebut untuk dapat menguasai barang objek warisan secara tunggal dan mutlak dalam kekuasaannya, sehingga ia memeras pihak lainnya untuk meyerahkan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri.

(3) Memaksa orang lain dengan.

Dalam hal memaksa ia telah memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melakukan apa yang diperintahkannya, hal ini dapat dikatakan sebagai melawan hak dari orang yang dipaksanya tersebut. Melawan hak sendiri merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena seseorang tidak dapat begitu saja memaksakan suatu hal kepada orang alian, karena hal ini melanggar hak asasi dari korbannya tersebut.

(4) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul tangan, menyepak, menendang dan berbagai perbuatan fisik yang lain baik secara tangan kosong atau dengan segala macam senjata. Kekerasan dapat pula dipersamakan dengan membuat orang lain dalam keadaan tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Misalnya dengan mengikat tangan dan kaki menggunakan tali atau dengan mengurung korbannya di kamar, atau dengan memberikan suntikan yang dapat

melumpuhkan orang tersebut. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam Putusan No. 28/Pid.B/2009/PN-Srg Tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Namun demikian hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoretis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama saatu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat penjatuhan pidana dalam suatu perkara terkadang tidak sama antara suatu perkara dengan perkara lain yang pada pokoknya sama. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Hakim dalam suatu perkara di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan demi adilnya putusan terhadap perkara tersebut. Dimana sebagian besar hakim di indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis dalam menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara. Berikut penulis jelaskan pemaparaan mengenai teori pertimbangan hakim :

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara, akan didapat fakta hukum atau fakta yuridis. Dalam Undang-Undang pun telah ditetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan. Inilah yang

disebut sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

(1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum dalam beracara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dakwaan antara lain memuat:

- (a) Identitas terdakwa
- (b) Locus dan tempus delicti
- (c) Tindak pidana yang didakwakan
- (d) Pasal yang dilanggar oleh terdakwa karena perbuatannya

(2) Keterangan saksi

Hal lain yang mempunyai arti yang tak kalah penting dalam suatu proses peradilan adalah mengenai keterangan saksi, karena melalui keterangan saksi dapat digali informasi yang sebenarnya mengenai perkara yang terjadi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Dijelaskan dalam Pasal 185 KUHP, bahwa keterangan saksi dapat berwujud keterangan secara lisan di muka persidangan maupu keterangan yang diberikan secara

tertulis. Dalam hal ini saksi memberikan keterangannya secara tertulis setelah disumpah sebelumnya. Kemudian keterangan tertulis tersebut dibacakan di muka persidangan ketika pemeriksaan terhadap saksi yang tidak dapat hadir tersebut dilaksanakan.

(3) Keterangan terdakwa

Pengaturan mengenai keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 KUHAP. Dimana yang disebut sebagai keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan dari seorang terdakwa juga dapat diberikan di luar persidangan untuk selanjutnya dibacakan dalam persidangan, namun dalam ayat (2) Pasal 189 KUHAP disebutkan bahwa hal itu harus disertai dengan persyaratan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang-barang bukti tidak termasuk alat bukti. Sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

Macam dari barang bukti antara lain meliputi:

- (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- (b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- (c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- (d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal yang ada dalam peraturan pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam Pasal perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka Pasal tersebut bisa dikenakan padanya.

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa hal. Dimana melalui pertimbangan non yuridis ini diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat lahir dari suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan. Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain adalah:

- (1) Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa.

Yang mendasari terjadinya tindak pidana adalah hal yang mempunyai kekuatan yang utama yaitu latar belakang

terdakwa. Dimana yang disebut dengan latar belakang terdakwa adalah suatu hal atau keadaan, yang karena adanya keadaan tersebut maka menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Karena dalam suatu perkara belum tentu si terdakwa sebenarnya menginginkan terjadinya suatu perkara yang ia lakukan tersebut, namun dorongan tersebut yang membuatnya melakukan suatu tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan agama atau pun keyakinan yang dianut terdakwa ternyata mempunyai arti penting pula bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dengan meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang diajarkan dalam agama ataupun keyakinan terdakwa hakim dapat mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Hakim dapat pula mempelajari hukuman apa yang menurut agama yang ia percayai pantas dikenakan kepadanya. Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam setiap kepala putusan juga dapat mewakili bawasannya dalam memutus setiap perkara, hakim tidak hanya mendasarkannya pada nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat namun juga atas dasar nilai Ketuhanan, yang tentunya ada dalam agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh terdakwa.

(2) Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa, merupakan hal yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Usia dan tingkat

kedewasaan terdakwa, juga mempunyai arti penting bagi terlaksanya suatu perbuatan pidana. Dimana usia ternyata tak dapat dijadikan patokan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat kedewasaan, karena belum tentu seorang mempunyai usia dan tingkat kedewasaan yang selaras.

Status sosial yang dimiliki seseorang dalam pranata hidup di masyarakat juga mempunyai arti yang tak kalah penting dalam potensinya menimbulkan tindak pidana. Bagi seseorang yang merasa punya kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosialnya tentu akan terjadi proses pemikiran ulang sebelum ia melakukan suatu perbuatan pidana, lain halnya dengan seseorang yang merasa bahwa kehadirannya di masyarakat tak mempunyai arti penting.

Keadaan psikis seseorang pada suatu waktu mempunyai potensi yang besar terhadap terjadinya tindak pidana oleh orang tersebut. Keadaan psikis tersebut dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, yang dapat berubah apabila terpengaruh beberapa hal, misalnya karena adanya pengaruh dari orang lain, adanya keadaan yang tidak menyenangkan hati, amarah dan emosi yang meluap-luap, dan lain sebagainya.

(3) Akibat perbuatan terdakwa

Hal ini merupakan suatu point yang tak kalah penting untuk dikaji, karena akibat yang timbul dari suatu perkara yang sama yang dilakukan di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda dapat mempengaruhi akibat yang ditimbulkan. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian dari pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas,

paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam (Rusli Muhammad,2007:212-220).

Dari teori pertimbangan hakim tersebut apabila diaplikasikan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Putusan No.28/Pid.B/2009/PN-Srg tentang perkara pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Maka didapat analisa penulis mengenai pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutus perkara No.28/Pid.B/2009/PN-Srg, yaitu:

1. Adanya tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam Persidangan, yang kemudian atas tuntutan tersebut, para terdakwa mengajukan pernyataan tertulis yang pada pokoknya menyebutkan terdakwa memohon hukuman yang seringan mungkin dengan alasan menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang ditanggapi Penuntut Umum dengan menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya.
2. Adanya fakta bahwa dalam persidangan ini terdakwa menghadapi sendiri perkaraanya tanpa didampingi Penasihat Hukum.
3. Adanya surat dakwaan dengan bunyi sebagai berikut:
----- Bahwa mereka terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL dengan RUDIYANTO dan HANDOKO (disidangkan dalam perkara Denpom) secara bersama-sama dengan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 November 2008 sekitar jam 15.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, bertempat pertama di Dukuh Sidorejo RT 5/14 Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dan yang kedua di Dukuh Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang yang bernama Sukidi dan Ir. Agung Purnomo dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang berupa sepeda motor Tossa W 5010 LJ yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi Sukidi atau sedikit-tidaknya kepunyaan orang lain saksi para terdakwa, perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mula-mula terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL mendapat tugas dari kantor ADIRA Sragen atau menggunakan jasa para terdakwa dengan surat tugas untuk menagih/menarik kredit angsuran macet dari ADIRA dengan imbalan apabila berhasil menarik sepeda motor mendapat jasa dari adira sebesar Rp 750.000,00 kemudian mereka para terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No Pol AD 2622 YS sedangkan Handoko berboncengan SPM dengan Rudiyanto dengan tujuan bersama-sama ke rumah Sukidi yang kredit SPM nya macet 5x di Adira setelah mereka berempat sampai di rumah Sukidi kemudian menagih kredit SPM yang macet 5x, waktu itu saksi SUKIDI mengatakan kepada para terdakwa “sabar dulu minta waktu beberapa hari” oleh para terdakwa dijawab “tidak ada alasan-alasan” maka para terdakwa tetap memaksa saksi Sukidi untuk membayar angsuran yang macet sekarang juga, berhubung saksi Sukidi tidak mempunyai uang, para terdakwa lantas menanyakan sepeda motor Vega R yang dikredit di Adira

oleh saksi Sukidi dijawab “bahwa SPM tidak ada di rumah karena di bawa anaknya ke Surabaya” kemudian terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN,terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL, serta ANDOKO dan RUDİYANTO meminta secara paksa dengan emosi sambil membentak-bentak saksi SUKIDI, karena pada waktu itu di rumah yang ada SPM Tossa milik saksi Sukidi maka SPM tersebut dibawa sebagai jaminana kredit yang macet, waktu itu saksi sukidi mempertahankan dan tidak boleh para terdakwa membawa SPM Tossa, karena salah satu orang mengeluarkan senjata api dan ditembakkan/diledakkan maka saksi Sukidi ketakutan dan membiarkan SPM Tossa tersebut dibawa oleh para terdakwa, setelah berhasil membawa SPM Tossa mereka terdakwa kemudian meninggalkan saksi Sukidi, kemudian mereka berempat menuju ke rumah MULYATNO Dukuh Dayung, Desa Miri, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang juga kredit angsurannya macet selama 6 bulan karena sudah beberapa kali dicari tidak ketemu maka terdakwa ANDI TRIYONO bin SUKIMAN menyuruh HANDOKO dan RUDİYANTO dengan maksud agar MULYATNO sebagai atas nama kredit Ir. AGUNG PURNOMO perlu dikerasi dan ditekan agar sepeda motor Smash dikredit dari Adira tersebut dapat ditarik lalu mereka berempat menuju ke rumah Ir. Agung Purnomo yang kebetulan MULYATNO menjadi pegawai di rumah tersebut setelah itu sampai di rumah Ir. Agung Purnomo para terdakwa menakut-nakuti MULYATNO dan teman-teman dengan memegang senjata api di tangan sambil mengatakan kepada orang-orang yang digiring “hayo podo mlebu apa mau kamu tak pistol kakinya” kemudian senjata api milik Handoko diletakkan di

pinggangnya dan digunakan untuk mengancam orang-orang dan juga mengatakan lagi “apa bosmu maksudnya Ir.Agung pa sudah tidak tedas sama pistol” belum sempat para terdakwa membawa SPM Smash yang kreditnya macet itu terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN terdakwa (II) ONGEN LAUTL bin NIKOLAS LATUL serta HANDOKO dan RUDIYANTO ditangkap petugas Polisi dari Polsek Miri;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

4. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di Persidangan.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut pasal ini maka unsur untuk dapat memidana terdakwa adalah minimum dua buah alat bukti yang sah harus dipenuhi selain adanya keyakinan hakim mengenai perkara yang terjadi tersebut. Jadi meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti oleh Penuntut Umum, namun apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut harus dianggap tidak bersalah dan dibebaskan.

Dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP, bahwa yang dapat disebut sebagai alat bukti yaitu :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Dalam Putusannya, pada Perkara No.28/Pid.B/2009/PN-Srg. Hakim yang memutus perkara dengan terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL tersebut telah memeriksa alat-alat bukti yang sah yang diajukan di muka persidangan berupa barang bukti, keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, alat bukti keterangan ahli tidak diajukan dalam persidangan.

C. Keterangan saksi

Dalam perkara pidana, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Agar alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, yang berbunyi “sebelum memberi keterangan ,saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

2. Mendengar, melihat dan mengalami.

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, telah dijelaskan bahwa kesaksian yang dapat digunakan dalam persidangan adalah keterangan yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, dan

alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan saksi *de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain, bukanlah merupakan alat bukti sah karena keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, hal ini teracntum dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Namun, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain (Andi Hamzah, 2000:261).

3. Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap cukup sebagai alat bukti. Pengaturan mengenai hal ini ada dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Dari adanya hal tersebut maka dalam upaya pembuktiannya JPU harus mendapatkan keterangan dari saksi yang jumlahnya lebih dari satu. Sehingga hakim dapat mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan yang muncul dari setiap saksi untuk dinilai kesesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Karena dalam Pasal 185 ayat (4) dibahas mengenai keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dalam persidangan, tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sangatlah tidak berguna. Karena apabila kesaksian yang diberikan adalah yang sesungguhnya seharusnya terdapat benang merah yang dapat disimpulkan sebagai bukti

terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa
(M Yahya Harahap, 2000:286-289).

Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi SUKIDI;
- 2) Saksi YATIN;
- 3) Saksi SUHARSONO,SE;
- 4) Saksi BERNARDUS DWI KURNIAWAN,SH;
- 5) Saksi DODIK WIJAYANTO;
- 6) Saksi IR. AGUNG PURNOMO;
- 7) Saksi MULYATNO,SE
- 8) Saksi SUWARTONO BIN SARDI
- 9) Saksi TAUFIK TRIHANDOYO
- 10) Saksi EDRIS SLAMET
- 11) Saksi YULI KURNIADI
- 12) Saksi RUDİYANTO MUSTIKA
- 13) Saksi HANDOKO

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 28/Pid.B/2009/PN-Srg, dengan terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL ,penulis akan memberikan analisa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas syarat keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a) Sebelum memberikan kesaksiannya di muka persidangan para saksi telah disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang para saksi anut, sehingga diharapkan hal yang diceritakan oleh para saksi adalah yang sesungguhnya mereka dengar, lihat dan alami sendiri.
- b) Keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahkan berhubungan erat dengan pengakuan terdakwa. Sehingga hal ini dapat menambah keyakinan hakim mengenai perkara yang didakwakan kepada terdakwa.
- c) Para saksi yang dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL, masing-masing memberikan keterangannya di muka sidang Pengadilan. Kecuali saksi Handoko yang memberikan kesaksiannya secara tertulis dikarenakan ia tidak dapat hadir dalam persidangan. Dan untuk itu Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan dari saksi Handoko.
- d) Dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan dengan terdakwa terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL, telah dihadirkan 13 (tiga belas) saksi, yaitu : Sukidi, Yatin, Suharsono,SE, Bernardus Dwi Kurniawan,SH, Dodik Wijayanto, Ir.Agung Purnomo, Mulyanto,SE, Suwartono bin Sardi, Taufik Tri Handoyo, Edris Slamet, Yuli Kurniadi, Rudiyanto Mustika, Handoko.

Jadi dalam proses pembuktian dapat dipenuhi asas *unus testis nullus testis* yang menyatakan bahwa satu saksi tidak

dapat dianggap sebagai saksi. Karena dalam persidangan telah berhasil dihadirkan saksi untuk dimintai keterangannya, yang berjumlah lebih dari satu saksi, yaitu berjumlah 13 (tiga belas) saksi.

- e) Dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan untuk dimintai keterangannya, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak berdiri sendiri namun saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.

D. Keterangan terdakwa

Terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL dalam persidangan mengakui dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi serta terdakwa tidak merasa keberatan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Serta keterangan dalam ayat (4) yang menyebutkan “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya”.

c. Barang bukti

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan juga ditemukukannya barang bukti yaitu :

1 buah senjata api rakitan, 4 butir amunisi, dan 1 selongsong;

1 unit SPM Tossa No.Pol W 5010 LJ;
1 unit SPM Suzuki Smash No.Pol AD 2622 YS;
1 lembar SKP an.Mulyatno,
1 lembar SKP an.Hartati,
1 lembar perjanjian Kerja Sama Penarikan Barang Jaminan Bermotor 079/MOU-SRG/11/2008 antara pihak Adira Finance dengan terdakwa (I) Andi Triyono bin Sukiman

5. Para terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unturnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya memberikan sesuatu barang atau menyerahkan barang;
5. Dilakukan secara bersama-sama.

Untuk selanjutnya unsur-unsur tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Barang siapa.

Bahwa unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, dalam hal ini dihadapkan kepada terdakwa (I) ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan terdakwa (II) ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani rohani, sehingga

terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke 2: Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa dalam melakukan penagihan kredit tersebut dari PT.Adira terhadap Sukidi yang SPMotornya macet kredit lebih dari 6 bulan dengan cara memaksa mengambil dan membawa sepeda motor Tossa No.Pol W 5010 LJ milik Sukidi. Bahwa apabila para terdakwa berhasil menarik satu unit sepeda motor maka para terdakwa dapat imbalan sebesar Rp 750.000,- dan uang jasa tersebut diberikan kepada para terdakwa apabila telah berhasil membawa motor ke Adira. Dengan dibawanya satu unit sepeda motor Tossa No. Pol W 5010 LJ milik Sukidi ke PT.Adira telah menguntungkan PT.Adira.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada Senin tanggal 17 November 2008 sekitar pukul 15.00 WIB di Dukuh Sidorejo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, para terdakwa bersama dua orang temannya yaitu : saksi Handoko dan saksi Rudiyanto Mustika telah melakukan perbuatan memaksa mengambil dan membawa sepeda motor Tossa W 5010 LJ milik

Sukidi. Bahwa teman para terdakwa yaitu Handoko membawa senjata api untuk menakut-nakuti Sukidi dan dipegang oleh Handoko di tangan kanannya. Kemudian para terdakwa bersama temannya yaitu Handoko juga membentak-bentak Sukidi dengan suara keras, lalu Handoko melakukan tembakan dengan menggunakan senjata api rakitan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : supaya memberikan sesuatu barang atau menyerahkan barang

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti , bahwa pada Senin tanggal 17 November 2008 sekitar pukul 15.00WIB di Dukuh Sidorejo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen para terdakwa bersama temannya yaitu : Handoko dan Rudiyanto Mustika telah melakukan perbuatan membentak-bentak Sukidi dengan suara keras lalu Handoko melakukan tembakan dengan menggunakan senjata api rakitan, dengan tujuan supaya Sukidi menyerahkan 1 unit sepeda motor Tossa W 5010 LJ milik Sukidi. Kemudian terdakwa Andi Triyono dengan paksa mengambil sepeda motor Tossa W 5010 LJ milik Sukidi, dan membawanya pergi dari rumah Sukidi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti , bahwa pada Senin tanggal 17 November 2008 sekitar pukul 15.00WIB di Dukuh Sidorejo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen para terdakwa bersama temannya yaitu : Handoko dan Rudiyanto Mustika telah melakukan perbuatan membentak-bentak Sukidi dengan suara keras lalu Handoko melakukan tembakan dengan menggunakan senjata api rakitan, dengan tujuan supaya Sukidi menyerahkan 1 unit sepeda motor Tossa W 5010 LJ milik Sukidi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

6. Bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, semua unsur-unsur pasal surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka para terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan tersebut, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
7. Selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan persidangan, dilakukan penahanan atas diri terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka masa penahanan para terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.
8. Para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.
9. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pengadilan Negeri Sragen dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP : “Pasal peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah :

- a. Perbuatan terdakwa bisa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan para terdakwa bisa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa adalah :

- a. Terdakwa berterus terang
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dipidana.

Dari adanya pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut, kemudian hakim mengadakan perundingan dan musyawarah untuk memutus perkara yang didakwakan kepada terdakwa, hingga akhirnya hakim mengeluarkan Putusan Nomor : 28/PID.B/2009/PN-SRG, yang pada amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa ANDI TRIYONO bin SUKIMAN dan ONGEN LATUL bin NIKOLAS LATUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Memerintahkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- a. 1 buah senjata api rakitan, 4 butir amunisi, dan 1 selongsong, dipergunakan dalam perkara lain di Denpom Surakarta.
- b. 1 unit SPM Tossa W 5010 LJ dikembalikan kepada saksi Sukidi
- c. 1 unit SPM Suzuki Smash AD 2622 YS dikembalikan kepada terdakwa Ongen Latul.
- d. 1 lembar SKP an. Mulyatno, 1 lembar SKP an Hartati, 1 perjanjian dikembalikan ke Adira Finance.
- e. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 1000,00.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab terdahulu, penulis mempunyai beberapa kesimpulan atas hal yang telah penulis tinjau dan bahaas lebih alnjut tersebut, antara lain:

1. Dalam KUHP telah terdapat pengaturan mengenai tindaak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu dalam paasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Andi Triyono bin Sukiman dan Ongen Latul bin Nikolas Latul dalam Perkara No 28/Pid.B/PN-Srg adalah:
 - a. Adanya tuntutan dari Penuntut Umum;
 - b. Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
 - c. Adanya surat dakwaan;
 - d. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti;

- e. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena :
- 1) Telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut.
 - 2) Adanya fakta hukum yang didapat dalam persidangan
 - 3) Terdapat pembuktian dengan semua barang bukti yang ada maupun melalui keterangan yaang diberikan oleh saksi dan terdakwa
- f. Terdapat hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut terdakwa dalam kasus ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu:

1. Bagi Pengadilan Negeri Sragen dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama, supaya meningkatkan kinerjanya dalam memberantas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah hukum Sragen khususnya pada tindak pidana yang dilakukan dalam hal penagihan hutang kredit. Bagi hakim dalam menjatuhkan putusan supaya lebih cermat dan teliti melihat latar belakang terjadinya suatu perkara, sehingga putusan dan lama pembedanaan dapat tepat sasaran.
2. Mengingat efek jera adalah suatu tujuan dari pembedanaan, maka bagi hakim yang memutus perkara pemerasan yang berawal dari penagihan

hutang kredit, hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar fenomena penagihan hutang kredit yang berakhir dengan pemerasan yang meresahkan masyarakat dapat diberantas. Pihak kepolisian sebagai mitra dari badan peradilan hendaknya mendukung upaya badan peradilan untuk memberantas berbagai kejahatan dan tindak pidana yang dewasa ini banyak dilakukan dalam penagihan hutang kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati.2000. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya
- Adami chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy P.Soekadi.1990 *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.B Sutopo. 1992. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.

- Lexy J Maleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya
- Martiman Prodjomidjojo. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Paramita
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) Diterjemahkan oleh PAF Lamintang*. Bandung: Pioner Jaya.
- Siswanto Sutojo. 2008. *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Soejono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

http://www.kamus-besar-bahasa-indonesia/online/kamus/gratis.php?hasil=sukses_id_11#hasil)

www.kamushukum.com/KH_entris.php?af_in

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=nl&u=http://www.elfri.be/Strafrec ht/afpersing.htm&ei=AjlfSunEGI2pkAWXobyocg&sa=X&oi=>